

**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR 904/IV/IV/2016



**GRATIS**  
TIDAK DIPERJUAL BELIKAN

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

## SEMINAR NASIONAL

"SISTEM PENEGAKAN ETIKA LEMBAGA PERWAKILAN"



# MKD DEKLARASIKAN PEMBENTUKAN ALKD

Ketua DPR Ajak Masyarakat  
Lebih Peduli dan Cinta  
Produk Dalam Negeri

Hal. 4

DPR Ingin Wujudkan  
Parlemen Modern  
Yang Punya Legitimasi  
dan Kepercayaan Publik  
Hal. 7

Wakil Ketua DPR  
Agus Hermanto Pimpin  
Delegasi ke Pertemuan  
Pertama Ketua Parlemen Eurasia  
Hal. 8

DPR-RI

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

# SEMINAR NASIONAL

## "SISTEM PENEGAKAN ETIKA LEMBAGA PERWAKILAN"

Jakarta 18 - 19 April 2016



Ketua MKD DPR Surahman Hidayat berfoto bersama Badan Kehormatan DPRD Provinsi seluruh Indonesia

## MKD Deklarasikan Pembentukan ALKD

**M**ahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bersama Badan Kehormatan DPRD Provinsi seluruh Indonesia mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Lembaga Kehormatan Dewan (ALKD). Asosiasi ini diharapkan memberikan manfaat bagi upaya penegakan etika lembaga perwakilan di masa yang akan datang.

"Hari ini, Pimpinan MKD DPR RI dan seluruh perwakilan DPRD Provinsi menandatangani sebuah Deklarasi untuk mengekspresikan dan tekad bersama, bahwa kita adalah satu, kita adalah Parlemen. Sekali bersatu kita tidak mau dipisah-pisahkan," kata Ketua MKD Surahman Hidayat, di Jakarta, (19/2).

Seminar nasional yang berlangsung selama dua hari, bertema "Sistem Penegakan Etika Lembaga Perwakilan" telah terlaksana dengan penuh makna. Seluruh peserta yang hadir yaitu Anggota DPRD Provinsi seluruh Indonesia, menyimak seluruh materi yang disampaikan oleh narasumber.

Oleh karenanya, Asosiasi ini harus ada yang bisa dihasilkan. Surahman mengatakan, yang perlu segera dilakukan antara lain konsolidasi organisasi dan administrasi, sosialisasi kepada para pihak *stakeholder*.

ALKD memiliki visi terwujudnya sinergitas penegakan etika lembaga perwakilan rakyat, dan misinya menjadi

organisasi mitra lembaga kehormatan lembaga perwakilan yang profesional. Selain itu, membangun sinergitas dalam upaya melakukan penegakan sistem etika lembaga perwakilan, mengembangkan sistem penegakan etika lembaga perwakilan yang efektif, dan mendorong terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang sistem penegakan etika lembaga perwakilan.

Seluruh peserta, juga mengamanatkan kepada Asosiasi ini untuk menselaraskan UU tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD RI Tahun 1945, dan melakukan *judicial review* terhadap UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). ■

(as), Foto: Kresno/hr



# RUU Tax Amnesty Jamin Keamanan dan Kenyamanan Iklim Usaha

**D**PR RI dan Pemerintah Indonesia memprediksi setelah disahkannya RUU Tax Amnesty maka akan berpengaruh baik pada iklim usaha di dalam negeri. Menurut Ketua DPR Ade Komarudin, RUU tersebut akan memberi jaminan keamanan dan kenyamanan para pengusaha.

Hal itu mengemuka setelah para Pimpinan DPR RI dan para Pimpinan Fraksi-Fraksi menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan jajaran Kabinet di Istana Negara, Jumat (15/4).

"Kami sangat senang, dengan pernyataan Presiden Jokowi kepada Pimpinan Fraksi dan Dewan bahwa RUU ini kita maksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para pengusaha agar membawa uang kembali ke Indonesia," ujar Akom, begitu Ketua DPR akrab disapa.

Pemerintah, melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa data yang dimiliki pemerintah sungguh sangat memberikan kepastian bagi para pihak yang mempertanyakan masalah *Tax Amnesty*.

"Tadi presiden menyampaikan berbagai hal, termasuk juga beliau menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki data yang sangat lengkap, *by name, by passport* terhadap nama-nama yang ada. Tetapi dengan rancangan undang-undang Tax Amnesty ini diharapkan betul-betul adanya *capital inflow* yang istilah presiden berbondong," jelas Pramono.

Berarti dengan hal tersebut uang *cash* yang akan masuk ke Indonesia berbondong-bondong melalui perusahaan yang bersangkutan. Menurut Akom, pernyataan pemerintah itu telah memberikan kepastian kepada para Pimpinan Fraksi di DPR. Dia berasumsi jika semua Fraksi di DPR sepakat dengan RUU



*Pimpinan DPR usai berkonsultasi perihal RUU Tax Amnesty dengan Presiden RI*

Tax Amnesty maka akan berdampak pada percepatan ekonomi nasional.

"Dan itulah yang memberi kepastian kepada para pimpinan fraksi yang mempertanyakan berapa uang masuk atas undang-undang ini kalau sudah jadi, dan pertanyaan itu terjawab sudah, sangat besar, nanti sangat berpengaruh pada penerimaan negara," papar Akom.

Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya ini juga memuji kegigihan Presiden Joko Widodo yang menghadapkan RUU Tax Amnesty dalam perekonomian nasional. Saat ini, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk melanjutkan proses pembahasan RUU Tax Amnesty menjadi UU.

"Kami senang dengan pernyataan Presiden Jokowi kepada pimpinan fraksi," kata Akom usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Akom mengungkapkan, kegigihan Presiden Jokowi memperjuangkan RUU semata-mata untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta melindungi dunia usaha.

Presiden Jokowi meminta dukungan DPR untuk melanjutkan proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak menjadi Undang Undang.

Presiden Jokowi mengatakan pemberlakuan UU Tax Amnesty sangat diperlukan untuk membantu neraca keuangan pemerintah. ■

## **PENGAWAS UMUM**

Pimpinan DPR-RI

## **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**

Dr. Winantuningtyastiti, M.Si  
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

## **WAKIL KETUA PENGARAH**

Dra. Damayanti, M.Si,  
(DEPUTI PERSIDANGAN)

## **PIMPINAN REDAKSI**

Drs.Suratna, M.Si  
(Kabag Media Cetak & Media Sosial)

## **WK. PIMPINAN REDAKSI**

Dra. Tri Hastuti  
(Kasubag Media Cetak)  
Ahyar Tibi, S.H  
(Kasubag Media Analisis)  
Insan Abdirrohman, S.H, M.Si  
(Kasubag MedSos dan Website)

## **REDAKTUR**

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

## **SEKRETARIS REDAKSI**

Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

## **ANGGOTA REDAKSI**

Agung Sulistiono, SH,  
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,  
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli,  
Devi Iriandi, Hendra Sunandar,  
Surahmat Eko, Ria Nur Mega

## **REDAKTUR FOTO**

Eka Hindra, Iwan Armanias

## **FOTOGRAFER**

Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,  
Jayadi Maulana, Arief Rachman,  
R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

## **ADMINISTRASI FOTO**

Hasri Mentari

## **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**

**Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI**

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350

Fax. (021) 5715341,

e-mail: [dpr.pemberitaan@gmail.com](mailto:dpr.pemberitaan@gmail.com)

[www.dpr.go.id/berita](http://www.dpr.go.id/berita)

## **PENERBITAN & DISTRIBUSI**

### **PIMPINAN PENERBITAN**

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP  
(Kabag Penerbitan)

### **WK. PIMPINAN PENERBITAN**

Mediantoro, SE  
(Kasubag Produksi),  
Pesta Evaria Simbolon, SE, M.Si  
(Kasubag Distribusi)

### **SIRKULASI**

Eko Murdiyanto

Telp. 021-571 5697

Fax. 021-571 5421

### **Email**

[penerbitandpr@gmail.com](mailto:penerbitandpr@gmail.com)

(isi berita dan materi foto  
diluar tanggung jawab Bagian Penerbitan)



## Ketua DPR Dorong ADKASI Papua dan Papua Barat Perkuat Komunikasi Dengan Masyarakat

Salah satu faktor terpenting lancarnya pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah terciptanya stabilitas keamanan dan kerukunan antara masyarakat. Konflik antar warga sejatinya bersumber dari kesenjangan pembangunan, lalu dibumbui dengan perbedaan pandangan antar kelompok. Untuk itu perlu dilakukan komunikasi intensif dengan masyarakat.

Demikian ditegaskan Ketua DPR RI Ade Komarudin saat menghadiri rapat koordinasi

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Wilayah Papua dan Papua Barat, di Sorong, Papua Barat, Senin (18/4).

"Saya sangat mendorong kemitraan DPRD dengan jaringan-jaringan untuk perdamaian Papua Barat dan Papua dalam bentuk dialog-dialog konstruktif. Dialog-dialog konstruktif tersebut sangat diperlukan untuk segera mengikis kecurigaan antar warga dan kecurigaan antara daerah dan pusat," ujar Akom, panggilan akrab orang nomor satu di DPR itu.



Ketua DPR Ade Komarudin dalam acara rapat koordinasi ADKASI

Politisi F-PG itu menambahkan, ADKASI Wilayah Papua dan Papua Barat, harus menggelorakan kembali semangat rekonsiliasi nasional yang tetap memprioritaskan keunikan Papua dan Papua Barat dan bingkai NKRI.

"Sebagai asosiasi aspirasi daerah paling timur Indonesia, ADKASI Papua Barat dan Papua harus menjelma menjadi lebih dari sebuah entitas politik. ADKASI Papua Barat dan Papua harus muncul sebagai entitas sosial dan budaya yang menyuarakan keunikan daerah Papua

Barat dan Papua dalam bingkai NKRI," tambahnya.

Akom mencontohkan, di Papua masih digunakan buku "Itu Api" sebagai pedoman belajar membaca ketimbang buku "Ini Budi" di sekolah-sekolah dasar di Papua Barat dan Papua ini, karena dianggap lebih sesuai dengan logika bertutur orang asli Papua.

"Keunikan sosial dan budaya semacam ini yang saya maksud harus sering disuarakan oleh teman-teman ADKASI Papua

Barat dan Papua di tingkat nasional," saran Akom.

Menurut politisi asal dapil Jawa Barat itu, ADKASI memiliki kekuatan besar untuk membangun Indonesia yang berkeadilan karena memiliki 17.000 anggota di 508 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

"Sumber daya ini akan menjadi kekuatan besar untuk membangun Indonesia yang berkeadilan, yang memperhatikan keunikan daerah untuk kelancaran pembangunan nasional," tutup Akom. ■

(sf), Foto: Dok/HR

## Ketua DPR Ajak Masyarakat Lebih Peduli dan Cinta Produk Dalam Negeri

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Ade Komarudin mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan mencintai produk dalam negeri. Ajakan ini disampaikan Akom, sapaan Ade Komarudin dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas), Kamis, (20/4).

Tahun ini, pemerintah memilih tema "Gerakan Konsumen Cerdas Mandiri dan Cinta Produk Dalam Negeri" dalam peringatan Harkonas 2016.

"Harkonas ini harus menjadi pendorong peningkatan produk-produk dalam negeri. Sebagai konsumen, kita harus lebih peduli dan mencintai serta membeli produk-produk dalam negeri," ujar Akom.

Menurut Pimpinan Dewan dari Fraksi Partai Golkar ini, Indonesia merupakan konsumen terbesar di ASEAN dan ke-4 di dunia dengan lebih dari 250 juta penduduk. Dengan posisi tersebut, Indonesia menjadi pasar utama bagi produk-produk luar negeri.

"Saya berharap seluruh rakyat Indonesia memperkuat nasionalisme dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri," tambahnya.

Dengan membeli produk-produk dalam negeri, lanjut Akom, maka konsumen Indonesia juga ikut andil dalam mendorong pertumbuhan sektor UKM di Indonesia.

"Produk-produk dalam negeri kita, mayoritas dihasilkan oleh pelaku-pelaku UKM. Oleh karena itu, dengan membeli produk-produk dalam negeri, secara



## Fadli Zon Tinjau RS Sumber Waras

**W**akil Ketua DPR RI Fadli Zon meninjau lokasi RS Sumber Waras yang bertempat di Jakarta Barat pada Senin, (18/04). Hal itu dilakukan untuk melihat kondisi lokasi tersebut dan berdiskusi dengan Direktur Utama RS Sumber Waras, Abraham. Beberapa hal dibahas dalam pertemuannya yang berlangsung secara tertutup tersebut. Setelah berdiskusi, Fadli kemudian meninjau secara langsung ke beberapa sudut bangunan rumah sakit tersebut.

Menurut Fadli, banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa rumah sakit yang menjadi polemik ini masih beroperasi. "Banyak orang yang tidak tahu rumah sakit ini masih beroperasi. Masih banyak bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Akses jalan di depan ini cuma satu, karena dikelilingi oleh rumah-rumah

penduduk," ujar Fadli.

Dia melanjutkan, masih banyak hal yang harus diselesaikan terkait RS Sumber Waras, misalnya harus diverifikasi terkait



Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat mengunjungi RS Sumber Waras

Pajak Bumi Bangunan (PBB). Ada dua kepemilikan yang berbeda antara kepemilikan SHM Shing Ming Hui dan kepemilikan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang merupakan hak guna bangunan.

"Tetapi PBB-nya masih satu di Jalan Kyai Tapa. Ini PBB-nya belum dipecah seharusnya dipecah karena dua kepemilikan yang berbeda. Walaupun masih ada perbedaan-perbedaan pendapat soal itu. Dari pihak rumah sakit mengatakan lahannya masih milik rumah sakit. Kalau ada 2 sertifikat biasanya ada 2 PBB," jelasnya.

"Secara dokumen itu ada di Kyai Tapa tapi secara fisik saya melihat jalannya bukan di Jalan Kyai Tapa, lahan yang dibeli oleh Pemprov DKI itu. Karena masuknya dari Jalan Kyai Tapa. Itu bisa dilaksanakan kalau memang ada kerjasama antara Sumber Waras yang dimiliki oleh Yayasan Shin Ming Hui atau Yayasan Kesehatan Sumber Waras," sambung Fadli.

Selanjutnya dia menekankan harusnya ada tim verifikasi untuk semua dokumen

dan kondisi lapangan. Terkait polemik jual beli antara Yayasan Sumber Waras dengan Pemprov DKI Jakarta. Fadli menyerahkan sepenuhnya kepada tim ahli yang melakukan pengecekan sesuai prosedur. Nantinya hasil kunjungan ini akan diserahkan kepada Komisi III DPR, untuk memperkuat tugas DPR dalam fungsi pengawasan terhadap eksekutif agar tidak melakukan penyimpangan terhadap undang-undang.

"Itu nanti ada orang yang mengurusinya. Saya hanya cek saja soal batas saja. Nanti hasilnya teman teman Komisi III akan menindaklanjuti," ujar Fadli. Namun demikian,

Fadli berharap penyidik tetap terus mengawasi kasus ini. Dirinya tidak ingin dalam perkembangannya kasus RS Sumber Waras ini berhenti di tengah jalan tanpa adanya penyelesaian.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengucapkan terimakasih kepada Dirut RS Sumber Waras yang sudah menerima dengan baik sidak mendadak ini. Dirinya menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR dalam fungsi pengawasan.

"Tadi saya melihat batas-batas dari lahan yang ada sekarang ini. Terima kasih Pak Abraham atas diterimanya kunjungan, ini bagian dari tugas saya untuk melihat secara fisik seperti apa sebetulnya," terangnya.

"Supaya masyarakat juga bisa tahu dan tidak menduga-duga kalau ternyata memang masih banyak bangunan di sini yang dipakai secara operasional untuk kepentingan rumah sakit dan masih banyak pasien yang ada di sini," pungkasnya. ■



Ketua DPR Ade Komarudin

otomatis kita juga ikut membantu pelaku usaha UKM di Indonesia semakin tumbuh dan berkembang. UKM telah terbukti menjadi salah satu tulang punggung perekonomian kita," ungkap Akom menambahkan. ■

(Imp). Foto: Jayadi/hr

(hs.mpl). Foto : Arief/hr



## Delegasi DPR RI Hadiri Konferensi Bank Dunia dan IMF

Delegasi DPR RI menghadiri konferensi Global Parliamentary Conference Of The Parliamentary Network On The World Bank And The International Monetary Fund (IMF) yang diselenggarakan di Gedung World Bank dan Gedung IMF, Washington DC, 10-12 April 2016.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Agus Hermanto (F-PD), memimpin delegasi DPR RI, yang diikuti oleh Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (F-PD) dan Anggota BKSAP Zulkieflimansyah (F-PKS).

Konferensi ini setidaknya dihadiri oleh sekitar 100 orang anggota parlemen dari 40 negara dan pembahasan ditujukan untuk memberikan kontribusi pada implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim.

Dalam pidato singkatnya, Agus menyampaikan pengalaman Indonesia



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto

yang telah menerima bantuan keuangan dari IMF dan berhasil menyelesaikan kewajibannya sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Sementara itu, Zulkieflimansyah menyampaikan intervensi tentang penggunaan energi terbarukan yang berbiaya mahal dalam penerapan ide penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda. Juga intervensi tentang pajak bagi usaha-usaha bergerak di bidang teknologi

yang semestinya tidak disamakan pengenaan pajaknya dengan usaha-usaha lainnya.

Dalam salah satu rangkaian acara, Nurhayati Ali Assegaf bertindak sebagai moderator pada pembahasan topik *Climate Change and Cleaner Energy Solutions* dan menegaskan pentingnya implementasi Paris Agreement dan tercapai Tujuan Pembangunan tahun 2030.

Sebagai masukan kepada Bank Dunia dan IMF, Delegasi DPR RI menyampaikan agar Bank Dunia dan IMF tidak selalu memusatkan kegiatan di Jakarta, namun agar membuat program-program yang lebih kreatif dan lebih banyak lagi khususnya untuk Indonesia bagian timur yang masyarakatnya masih membutuhkan dukungan pembangunan. ■

(sf) Foto: Dok. BKSAP/hr

## Fadli Zon Kunjungi BPDP Kelapa Sawit

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengunjungi kantor Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit yang berlokasi di Gedung Graha Mandiri, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Selasa, (19/04). Hal ini dimaksudkan untuk berdiskusi guna meningkatkan kapasitas petani.

Dalam paparannya, Fadli yang juga sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini akan mengupayakan peningkatan kapasitas petani.

"Kita bertemu dengan Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bayu Krisnamurti. Dengan pertemuan ini, kita ingin ada kerjasama untuk meningkatkan kapasitas petani," ujarnya di sela-sela kunjungannya.

Dalam kunjungannya ini, Bayu Krisnamukti menuturkan mendukung upaya kerjasama ini, karena BPDP ini adalah lembaga yang belum lama berdiri sehingga membutuhkan dukungan dari banyak pihak. "Dirut BPDP Bayu Krisnamukti mendukung upaya ini. Karena memang badan ini baru berdiri dan membutuhkan dukungan petani dan organisasi petani," jelas Fadli.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2011 diberlakukan moratorium perizinan kelapa sawit, terkait hal itu Fadli menyoroti kawasan Sumatera yang memiliki daerah perkebunan sawit yang sudah tua. Sebagaimana diketahui, Badan Pengelola



Wakil Ketua DPR Fadli Zon berdialog dengan Direksi BPDP

Dana Perkebunan Kelapa Sawit dibentuk oleh pemerintah seiring penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) guna mendorong produktifitas kelapa sawit di Indonesia. ■

(hs.mp) Foto : Iwan/jk



# DPR Ingin Wujudkan Parlemen Modern Yang Punya Legitimasi dan Kepercayaan Publik

**D**PR RI ingin mewujudkan suatu Parlemen yang modern dan mempunyai legitimasi serta kepercayaan yang tinggi dari publik. Penegakan kode etik diharapkan mampu meningkatkan kinerja Dewan sehingga menumbuhkan kepercayaan dan legitimasi publik.

"Kita (DPR) ingin mewujudkan suatu Parlemen yang modern yang mempunyai legitimasi dan kepercayaan yang tinggi dari publik. DPR RI yang akuntabel dan memperjuangkan aspirasi dari rakyat," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, saat membuka Seminar Nasional "Sistem Penegakan Etika Lembaga Perwakilan," di Jakarta, (18/4).

Dalam acara yang dihadiri unsur Badan Kehormatan DPRD Provinsi seluruh Indonesia ini, Pimpinan DPR Bidang Korpolkam melanjutkan, pemegang mandat rakyat, kinerja dewan tidak hanya dinilai dari berapa banyak legislasi yang dihasilkan atau fungsi pengawasan dan anggaran saja. Namun juga dari perilaku Anggota Dewan sehari-hari.

Hal ini lanjutnya, sudah menjadi resiko sebagai perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai penyambung aspirasi, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat. Berita mengenai tingkat kehadiran di sidang-sidang DPR, misalnya, atau tindak kriminal yang dilakukan oleh oknum anggota, dengan cepat menjadi konsumsi publik.

"Pernyataan dan sikap kritis kita yang terekspos di media massa dalam hitungan detik menjadi topik pembicaraan masyarakat, baik positif maupun negatif, maka diperlukan standar untuk fungsi pedoman kepatutan perilaku kita.

Utamanya menjalankan fungsi kedewanan bersama mitra internal," paparnya.

Selanjutnya, dijelaskannya, pada tatanan kebijakan internal, DPR telah menerbitkan dua aturan terbaru yaitu Kode Etik dan Tata Beracara DPR, yaitu Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 dan

menurutnya sangat normatif tergantung dari tempat dan waktu pada semua anggota Dewan berada. Asas norma kepatutan yang berlaku di wilayah Barat Indonesia tidak selalu sama dengan wilayah Indonesia di bagian Timur. Oleh karenanya, Fadli Zon menyerahkan kepada

Mahkamah Kehormatan untuk menjabarkan asas kepatutan ini dalam bahasa yang tidak ambigu dan bisa dilaksanakan.

Fadli Zon menginginkan semangat kode etik bukan hanya bertujuan untuk menetapkan sanksi dan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan. Semangatnya adalah mempromosikan dan membiasakan perilaku baik sebagai individu maupun institusi parlemen. Karenanya di semua dokumen kode etik parlemen tersebut mencantumkan bagian khusus soal edukasi anggota

parlemen dan mitra parlemen.

"Program penyadaran tentang dampak sistemik tindak pidana korupsi bisa menjadi edukasi parlemen oleh MKD. Sistem dan pelaksana sistem paling tidak bisa dipisahkan, tentang penegakan kode etik DPR pun sangat ditentukan oleh integritas dan independensi penegakan kode etik," katanya.

Menurutnya, ini harus dimulai dari proses rekrutmen anggota partai politik, dimana kesadaran untuk menegakkan kode etik kedewanan telah dipupuk sejak masa direkrut oleh partai politik masing-masing.

"Badan Kehormatan Partai Politik juga diharapkan melakukan peran aktif untuk mengedukasi anggota parpol masing-masing, agar ketika sudah duduk di lembaga DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, tidak canggung lagi dengan aturan-aturan dan etika yang diterapkan di institusi masing-masing," imbuhnya. ■



Pimpinan DPR dan sejumlah Anggota DPR berfoto dalam acara seminar nasional MKD

Peraturan DPR No.2 Tahun 2015.

Menurut pengamatannya, dua peraturan tersebut sebagai pedoman operasional yang cukup memadai, utamanya menjabarkan pelanggaran kode etik parlemen yang masuk ranah tindak kriminal. Soal ini, dia yakin penegakan kode etik lebih obyektif dan jelas untuk dilakukan. Ini dikarenakan ada banyak Undang-undang yang mengatur dengan tegas hal-hal yang menyangkut tindak kriminal berikut sanksi pidananya.

Selain itu, yang kerap menjadi perdebatan bagi eksternal maupun internal, dalam standar kepatutan berperilaku. Adalah Pasal 3 Ayat (1) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 yang mengharuskan Anggota Dewan untuk menghindari perilaku tidak pantas sesuai norma umum yang berlaku di masyarakat, di dalam gedung maupun di luar gedung DPR.

Pasal dan ayat ini menjadi acuan, yang



## Fadli Zon Terima Mahasiswa Universitas Malaya

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima kunjungan mahasiswa Universitas Malaya yang sedang melakukan pertukaran pelajar dengan Universitas Pancasila, Senin, (18/4), bertempat di Ruang Tamu Pimpinan DPR, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kunjungan ini, delegasi mahasiswa mengajukan pertanyaan sistem politik Indonesia dan juga mekanisme kerja DPR. "Ini adalah pertemuan mahasiswa Universitas Malaya, Malaysia. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Hukum. Mereka datang kesini untuk mengetahui sistem yang ada di DPR RI," ujar Fadli di sela-sela acara.

Beberapa poin dijelaskan Fadli seperti fungsi dan tugas komisi, alat kelengkapan dewan, serta proses politik yang ada di DPR beserta dinamikanya. "Tadi saya jelaskan bagaimana mekanisme kerja disini, diantaranya seputar alat kelengkapan dewan yang ada, komisi dan hal lainnya. Kemudian saya jelaskan juga proses politiknya, termasuk seputar bagaimana partai politik di Indonesia berlomba,"

paparnya.

Penjelasan ini penting mengingat, Malaysia adalah negara tetangga Indonesia sehingga ini penting untuk menjaga hubungan baik antar kedua negara. "Karena mereka negara tetangga kita, ingin mempelajari sistem ketatanegaraan Indonesia seperti apa.



Suasana pertemuan Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersama mahasiswa dari Malaysia

Bagi mereka ini adalah pelajaran yang penting karena sistem politik di Indonesia dan Malaysia agak berbeda," terangnya.

Terkait dengan kegiatan pertukaran pelajar, Fadli Zon menuturkan dukungannya sebagai upaya membangun karakter mahasiswa untuk terus mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman,

mengingat pemuda adalah tulang punggung penerus generasi yang ada sekarang.

"Terkait pertukaran pelajar saya kira sangat bagus, masa mahasiswa adalah masa pembentukan untuk menggali pengalaman, pemikiran, pengetahuan, sehingga saya sangat mendukung program

pertukaran pelajar, termasuk mereka yang tertarik dengan sistem parlemen kita," tegasnya.

Bagi politisi Partai Gerindra ini, pertukaran pelajar sebagai

sarana bagi mahasiswa untuk saling bertukar pikiran dan gagasan, "Harapannya tentu dengan adanya pertukaran dan dialog ini akan ada pengertian diantara para mahasiswa dan tukar pengetahuan, nantinya mereka ini kan generasi yang akan menggantikan generasi sekarang," pungkash Fadli. ■

(hs.mp) Foto : Rumi/hr

## Wakil Ketua DPR Agus Hermanto Pimpin Delegasi ke Pertemuan Pertama Ketua Parlemen Eurasia

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto memimpin delegasi DPR menghadiri The First Meeting of the Speakers of Eurasian Countries' Parliament, didampingi Wakil Ketua BKSAP Rofi Munawar (F-PKS), dan Anggota BKSAP Yosef Umar Hadi (F-PDI Perjuangan).

Dalam sambutannya, Agus Hermanto

mendukung ide menjadikan acara Pertemuan Ketua Parlemen Eropa Asia (Eurasia) sebagai agenda tahunan. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang ini mencetuskan ide penguatan kerjasama antar parlemen Eurasia dan ASEAN. Terlebih dengan adanya implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan

Eurasian Economic Union (EEU). Masyarakat Ekonomi yang membentang dari Jakarta sampai ke St Petersburg akan mungkin terealisasi dan tidak tertandingi baik secara ukuran maupun potensi.

Agus Hermanto juga menyampaikan pandangan mengenai terorisme sebagai salah satu tantangan terbesar masyarakat



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Wakil Ketua BKSAP dalam pertemuan Ketua Parlemen Eropa Asia

internasional abad ini. Penyelesaian tantangan menyeluruh termasuk pembentukan legislasi yang komprehensif, promosi multikulturalisme, dialog antar sivilisasi dan program deradikalisasi menjadi opsi terbaik yang dapat ditawarkan parlemen dalam upaya

antara Eropa dan Asia.

Di sela-sela pertemuan, Wakil Ketua DPR RI mengadakan pertemuan dengan negara-negara yang hadir. Dalam pertemuan bilateral dengan Belarus, dibahas mengenai penguatan kerjasama bilateral dalam berbagai bidang terutama

bersama penanggulangan terorisme.

Pertemuan yang diprakarsai Rusia dan Korea Selatan di hadiri sejumlah negara penting termasuk RRC dan Iran. Pertemuan juga menghasilkan pernyataan bersama mengenai penguatan kerjasama di berbagai bidang

perdagangan dan alutsista. Selain itu Belarus menyampaikan keinginan untuk *follow up* perkembangan mengenai usulan Belarus agar Indonesia memiliki kantor perwakilan di Minsk dan peningkatan kerjasama *sister cities* dengan berbagai daerah di Indonesia.

Agus Hermanto menyampaikan akan mencatat hal tersebut untuk disampaikan ke pihak terkait di tanah air. Dalam hal ini kedua negara merasakan optimisme yang sama akan masa depan hubungan kedua negara terutama dengan disahkannya UU hubungan bilateral RI-Belarus.

Wakil Ketua BKSAP, Rofi Munawar, menyampaikan mengenai perkembangan GKS DPR RI - Parlemen Belarus. Selanjutnya, Yosef Umar Hadi menyampaikan mengenai kerjasama pariwisata dan timbal balik *visa-on-arrival*. Indonesia telah memberikan VOA kepada warga negara Belarus sejak September 2015. ■

(bksap,mp) Foto : dok.BKSAP/hr

## Jalin Komunikasi Untuk Kerjasama yang Semakin Baik

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, agar kerjasama yang sudah ada dapat berjalan semakin baik, maka perlu dijalin komunikasi yang baik pula. Terutama, kepada negara-negara sahabat Indonesia.

Demikian dikatakannya usai menerima *Minister of International Department of Central Committee of Communist Party of China*, Song Tao, dengan didampingi Duta Besar Rakyat China atau Tiongkok, Xie Feng, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4).

"Dia (Delegasi Tiongkok, red) mengharapkan, kerjasama yang sudah ada antara Indonesia dengan Tiongkok, dapat terjalin dengan baik. Saya sampaikan kepada beliau, kalau sebagai negara sahabat yang baik, kalau ada apa-apa kita dapat bicarakan, dengan komunikasi yang baik," jelas Akom, panggilan akrab Ade.

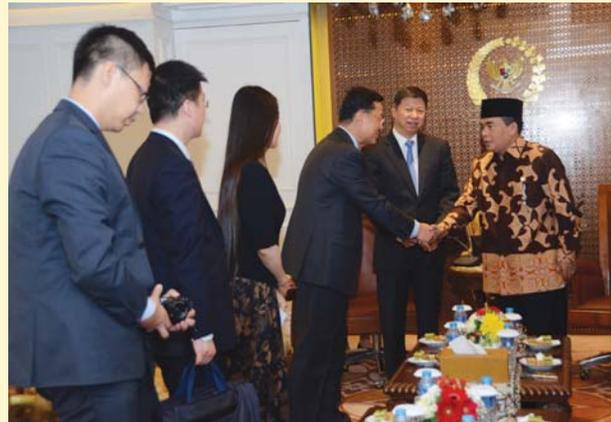
Hal ini salah satunya terkait dengan

insiden yang terjadi di Kepulauan Natuna, antara Indonesia dengan Tiongkok, beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, dengan komunikasi yang baik, permasalahan dapat diselesaikan.

"Dengan komunikasi yang baik, Insya Allah masalah dapat terselesaikan dengan baik. Kerjasama yang sudah ada, akan semakin bagus lagi," imbuh politisi F-PG itu.

Akom mengatakan, kerjasama dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung antar kedua negara, merupakan wujud kerjasama yang baik, dan satu tahapan awal untuk kerjasama berikutnya. Ia juga meminta kedua negara untuk menjaga kerjasama dan investasi yang sudah terjalin.

"Masing-masing kita juga harus menjaga kerjasama itu. Kerjasama selama



Ketua DPR Ade Komarudin menerima Delegasi Tiongkok

ini, khususnya di bidang transportasi, agar tetap terjalin," kata politisi asal dapil Jawa Barat itu sembari mengatakan belum ada pembicaraan mengenai kerjasama berikutnya.

Hadir dalam pertemuan ini diantaranya Wakil Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (F-PG), Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha (F-PPP) dan Dave Akbarshah Fikarno (F-PG), Anggota Komisi II DPR Sareh Wiyono (F-Gerindra), Anggota Komisi X DPR Laila Istiana (F-PAN), dan Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo (F-PDI Perjuangan). ■

(sf), Foto : jaksa/hr



## Pengukuhan Pengurus DWP Setjen DPR RI Masa Bhakti 2014-2019

**K**etua Umum Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat Wien Ritola Tasmaya, melantik Ketua dan Pengurus DWP masa bakti 2014-2019. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran istri dalam mendukung kinerja aparat sipil negara Setjen DPR RI. Pengukuhan dilakukan di Ruang KK I, Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Kamis (14/4).

Telah ditetapkan Ketua DWP Setjen dan Badan Keahlian DPR RI masa bhakti 2014-2019 adalah Ida Johnson R, Wakil Ketua I Titik

Djuned, Wakil II Tanti Setyanta Nugraha, Sekretaris I Mulyati Suhadad, Sekretaris II Erna Agustina, Sekretaris III (Ny. Dwi Usdekiawan), Bendahara I (Ny Neno Dimiyati), Bendahara II (Ny Puji Masdar), Ketua Bid. Pendidikan Lasini Makmur, Ketua Bid. Sosial Asep Saefullah, Ketua Bid Ekonomi Triana Jaka dan anggota lainnya.

Dalam kesempatan ini Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti selaku Penasehat DWP mengucapkan selamat kepada pengurus DWP yang baru dikukuhkan, DWP yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan istri ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berperan di lingkup Setjen dan BKD.



Prosesi pengukuhan pengurus DWP Setjen DPR RI Masa Bhakti 2014-2019

"Ibu-ibu ini tidak hanya berperan ganda tetapi multifungsi. DWP hadir untuk mendukung tugas-tugas para suami yang tidak ringan dan untuk menciptakan suasana yang nyaman, tenteram juga dari sisi memajukan organisasi DWP. Saya tahu sudah banyak yang dilakukan oleh ibu-ibu DWP antara lain berbagai usaha yang sudah dilakukan, ada Risanti, toko cenderamata, Tempat Penitipan Anak (TPA) bahkan Taman Kanak-kanak (TK) ini harus terus dibangun walaupun ada masalah-masalah yang menjadi pengalaman kita," ujarnya.

Ia juga berharap DWP Pusat bisa mengikutsertakan DWP Setjen dan BKD

guna menambah ilmu, wawasan, kemampuan dan keterampilan untuk mengelola unit yang sudah ada.

DWP Pusat, Wien Ritola mengatakan, Pengukuhan DWP ini merupakan awal kebangkitan dari DWP Setjen dan Badan Keahlian DPR RI untuk lebih bisa mengembangkan organisasi dengan baik dalam artian lebih kepada aksi mensejahterakan anggota dan masyarakat, "Mereka harus menjadi pelaku-pelaku yang lebih bermanfaat. Jadilah *partner*

yang baik dari suaminya itu lah yang kami harapkan,"kata Wien.

Sementara itu, usai dikukuhkan, Ketua DWP Setjen dan Badan Keahlian DPR RI Ida Johnson R, berharap DWP dapat bekerjasama dengan baik guna menjalankan program-program, baik program DWP Pusat maupun DWP Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

"Dengan demikian tujuan organisasi kita sebagaimana di dalam lagu Mars dan Hymne DWP bersatu padu ikut berjuang mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta membina istri pegawai negeri dapat tercapai dengan baik," harapnya. ■

(lrm), Foto: kresno/hr

## Paket Kebijakan Ekonomi Diharapkan Perluas Penempatan Naker

**P**emerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga XI, untuk menghadapi era perdagangan global. Wakil ketua Komisi IX DPR RI Asman Abnur (F-PAN) berharap, dengan paket kebijakan yang sudah dirilis pemerintah itu, seharusnya target penempatan tenaga kerja (naker) dapat lebih luas lagi.

"Mudah-mudahan dengan paket kebijakan itu, penempatan tenaga kerja

dapat melebihi target," kata politisi asal dapil Kepulauan Riau itu saat rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/4).

Dalam rapat ini juga dibahas mengenai peta jalan dan implementasi program peningkatan kualitas SDM Indonesia dalam menghadapi era perdagangan global, strategi pencapaian target dan indikator *Sustainable Development Goal's* (SDG's)

2030 dalam bidang ketenagakerjaan, dan evaluasi perkembangan capaian target 2,5 juta lapangan kerja setiap tahun oleh pemerintah.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menanyakan mengenai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya paket kebijakan itu menyebutkan bahwa kenaikan upah minimum setiap tahun pada pekerja sektor



UMKM dapat berjalan.

"Apa yang akan dilakukan agar paket kebijakan itu bisa terlaksana. Karena kalau ini bisa terlaksana, artinya 97 persen pekerja kita akan keangkat ekonominya," kata politisi F-PPP itu.

Politisi asal dapil DKI Jakarta itu menyoroti mengenai peremajaan Balai Latihan Kerja (BLK). Menurutnya, peremajaan BLK ini rasanya tidak diperlukan jika upaya yang dilakukan hanya parsial saja. Pasalnya, harus dibarengi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pihak industri ataupun universitas.

Menanggapi hal itu, Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, selama ini peningkatan penyediaan kesempatan kerja telah dilakukan pemerintah melalui aktivitas dan peningkatan kegiatan dari sektor infrastruktur, industri, ekonomi, regulasi, kebijakan dan implementasi.

"Pemerintah dan pihak swasta harus terus bekerja sama dalam penyediaan kesempatan kerja dan memperbanyak

penempatan tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran melalui kegiatan bisnis dan ekspansi ekonomi baik di bidang nasional maupun internasional," kata Hanif.

Lebih lanjut ia mengatakan, target sebanyak 10 juta kesempatan kerja selama tahun 2015-2019, tidak dapat disediakan hanya oleh Kementerian Ketenagakerjaan sehingga ia terus melakukan koordinasi melakukan pendataan kesempatan kerja yang dihasilkan oleh aktivitas Kementerian/lembaga lain maupun pihak swasta.

Raker ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk terus melakukan revitalisasi dan evaluasi agar Balai Latihan Kerja (BLK) dapat berfungsi secara maksimal guna meningkatkan kompetisi kerja.

Selanjutnya, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian ketenagakerjaan RI untuk menyusun *road map* SDG's 2030 bidang

ketenagakerjaan dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's) agenda 2030.

Kemudian, Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan koordinasi penempatan tenaga kerja sesuai dengan target 10 juta dalam lima tahun. ■



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati

(blisap.mp) Foto : dok.BKSAP/hr

## Palapa Ring Sangat Mulia, Namun Perlu Dikaji

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan bahwa proyek Palapa Ring itu mulia guna membangun konektivitas ke seluruh daerah Indonesia. Hal itu disampaikan ketika melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (18/4).

"Proyek Palapa Ring ini sebetulnya sangat mulia, ini adalah inisiatif dalam membangun konektivitas ke seluruh wilayah NKRI dengan kerjasama pihak swasta. Ini adalah ide yang baik," ujarnya.

Namun ketika menyangkut Universal Service Obligation (USO), Tantowi menuturkan pertanyaan terkait daerah pembangunan jaringan komunikasi yakni daerah pesisir, pedalaman dan pertanian. Terkait pertanian, Anggota DPR Fraksi Golkar itu menanyakan mengapa bukan daerah terluar atau terdepan yang selama ini mengalami kesulitan konektivitas untuk dilakukan pembangunan tersebut.

"Ketika daerah pertanian itu masuk kawasan pembangunan, mengapa bukan daerah terluar atau terdepan yang selama ini juga mengalami kesulitan konektivitas?" tanyanya.

Hal itu diperkuat dengan temuannya ketika berkunjung ke Nias dan menemukan kesulitan terkait konektivitas yang ada disana. "Kami berkunjung ke Nias, disana terlihat nyata betul bahwa konektivitas itu hanya ada di Nias Selatan. Di Gunung Sitoli, tapi ketika kita terus berjalan ke dalam maka konektivitas itu menjadi permasalahan sendiri," paparnya.

Sebagaimana diketahui, Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkaran kecil serat optik untuk



Pimpinan dan Anggota Komisi I berdialog dengan Menkominfo

wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku menjadi satu *backhaul* untuk menghubungkan semuanya.

Nantinya, proyek Palapa Ring ini akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada dengan jaringan baru pada wilayah timur Indonesia (Palapa Ring-Timur). Palapa Ring-Timur akan dibangun sejauh 4.450 KM yang terdiri dari *sub marine cable* sejauh 3.850 km dan *land cable* sepanjang 600 KM dengan *landing point* sejumlah lima belas titik pada 21 kota/kabupaten. ■

(hs.mp) foto : Andri/hr



## Komisi IV Siap Dampingi Menteri LHK Segel Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Komisi IV DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dengan agenda pembahasan tentang RUU Prioritas dan Prolegnas, evaluasi kinerja dan serapan anggaran triwulan I tahun 2016, hasil kunjungan kerja, serta masalah reklamasi pantai utara Jakarta, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/4).

Dalam acara yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo, sejumlah anggota Komisi IV menyatakan siap untuk ikut mengawal dan mendampingi Menteri LHK, bila berani melakukan tindakan hukum berupa penyegelan terhadap seluruh aktifitas reklamasi di pantai utara Jakarta.

Edhy Prabowo yang didampingi para Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, Viva Yoga Mauladi dan Ibnu Multazam, yang mempertanyakan secara tegas kepada Menteri LHK, apakah reklamasi pantai utara Jakarta telah melanggar Undang-undang, dan bila memang



Suasana raker Komisi IV DPR dengan Menteri LHK

reklamasi tersebut telah melanggar Undang-undang apakah Kementerian LHK mampu melakukan tindakan penegakkan hukum atas pelanggaran itu, berupa penyegelan terhadap seluruh wilayah yang direklamasi.

Menanggapi hal itu Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyatakan, Kementerian-nya meminta agar proyek reklamasi pantai utara Jakarta itu dihentikan sementara pelaksanaannya. "Kami mengusulkan untuk menghentikan sementara proyek reklamasi pantai utara Jakarta, termasuk Bekasi dan Tangerang. Oleh karena itu saya juga mohon arahan dan bimbingan dari Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR,"

tandasnya.

Atas sikap tersebut, Komisi IV memberikan apresiasi dan dukungan agar dilakukan penghentian sementara reklamasi pantai utara Jakarta, serta siap untuk mendampingi bila akan dilakukan tindakan hukum berupa penyegelan atas proyek reklamasi tersebut.

Terkait Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, Siti Nurbaya menjelaskan, terdapat tiga RUU bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu: RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik, RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta RUU tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

"Revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya dilatar belakangi karena UU ini telah berusia lebih dari 25 tahun. Selain itu mempunyai kelemahan yang cukup mendasar bagi perlindungan jangka panjang SDA Hayati beserta keanekaragamannya, baik di tingkat Genetik, Species maupun Ekosistem," jelas Siti Nurbaya. ■

(dep.rmp) Foto : Naefuroji/hr

## Manajemen RS Vertikal Perlu Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Pengembangan Rumah Sakit (RS) Vertikal yang berada dibawah kelola Kementerian Kesehatan sekaligus menjadi rumah sakit rujukan mendapat respon baik dari DPR khususnya Komisi IX saat RDPU, di Gedung Nusantara I, DPR, Jakarta (19/4).

Namun, Wakil Ketua Komisi IX, Asman Abnur meminta agar jajaran manajemen RS Vertikal terus meningkatkan kualitas pelayanan dan berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu juga

perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada dokter atau para medis lainnya serta melengkapi rumah sakit dengan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Anggota Komisi IX DPR, Putih Sari mengatakan rata-rata rumah sakit vertikal kita sudah cukup baik hanya saja sistem manajemen perlu diperbaiki, karena terbukti di setiap rumah sakit terutama yang menjadi rujukan nasional itu masih banyak pasien yang terlantar.

"Jadi ada sistem yang tidak berjalan,



Anggota Komisi IX DPR Putih Sari

seperti sistem rujukan antar rumah sakit, sistem informasi rumah sakit yang tidak



kelas *roadmap*-nya. Ini harus kita perbaiki ke depan karena rumah sakit vertikal cukup menyimpan perhatian dalam artian untuk alokasi APBN cukup besar tentunya jangan hanya fisiknya yang dikembangkan, "ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pengembangan RS Vertikal akan membantu JKN karena merupakan rumah sakit yang mendapatkan prioritas, dan diharapkan pengembangan RS Vertikal dapat mengurangi beban rumah sakit regional karena sifatnya sudah menjadi rujukan nasional.

"Tetapi tentunya sistem rujukannya harus berjalan dan berjenjang antar rumah sakit harus berjalan karena kalau tidak keadaannya akan sama seperti ini, pasien akan menumpuk di satu rumah

sakit, harus ada terobosan dari pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut sehingga yang namanya pelayanan kesehatan itu tidak hanya cakupannya saja yang universal tetapi juga pelayanannya, "tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo menjelaskan terkait strategi pengembangan RS Vertikal, yaitu, pertama setiap rumah sakit *masterplan*, renstra dan RBA yang terkait dan berkesinambungan menggambarkan arah pengembangan RS dan tahap pencapaian serta ukuran keberhasilan. Kedua, Setiap RS mempunyai pelayanan unggulan yang dituangkan dalam renstra RS.

Ketiga, melakukan kerjasama dengan RS LN dan pengakuan mutu oleh

lembaga akreditasi internasional agar mampu berkompetensi global, serta disetiap RS dilakukan pengukuran kinerja dan pembayaran SDM berbasis kinerja, dan manajemen mempunyai tata kelola organisasi yang baik dan diukur dengan pencapaian WTP, WBK-WBBM

Dan Keempat, mempersiapkan beberapa RS vertikal kelas B menjadi A (RS M Djam dan RS Soeradji) yang kelas C menjadi kelas B (RE Ratatotok). Kemudian, mempersiapkan RS vertikal sebagai holding secara bertahap. Meningkatkan peran sebagai RS rujukan dan pengampunan beberapa layanan unggulan serta peran sebagai pusat penelitian dan pendidikan dokter, spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya. ■

(rnm), Foto : Jayadi/hr

## Nasyit Umar Kunjungi Kelompok Tani Sinjai, Sulsel

Wajah para petani terlihat bahagia menyambut kedatangan Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Nasyit Umar. Selain memberikan pengarahan pertanian, kedatangannya sekaligus untuk meninjau mesin penggiling padi bantuan Kementerian Pertanian untuk kelompok tani setempat.

Berlokasi di Kelurahan Mannanti, Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Minggu (17/4), Nasyit menemui kelompok tani Tudang Sipakaine II. Kepada kelompok tani ini sudah diberikan *rice milling unit* (RMU), sebuah mesin penggiling padi berkapasitas 750-1500 kg per jam. Nasyit telah membantu menyalurkan mesin penggiling ini ke Sinjai.

Anggota F-PD DPR ini berharap, penggiling padi tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani setempat untuk memudahkan menggiling padi menjadi beras. Dijelaskan Nasyit, para petani juga bisa langsung menjual gabah ke Bulog setempat dengan harga Rp3.700/kg. Sementara untuk beras, Bulog akan membelinya Rp7.300/kg.

"Bila Bulog tak mau membelinya,

laporkan kepada saya. Ini sudah keputusan rapat Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian," tegasnya, yang disambut gembira para petani. Marsuki, ketua kelompok tani setempat, mengatakan,

jalan yang rusak. Nasyit yang mendengar keluh kesah para petani ini, langsung menghubungi pejabat dinas setempat untuk segera memberi bantuan kepada kelompok petani di Mannanti.



Pertemuan Anggota Komisi IV DPR M.Nasyit Umar dengan kelompok tani di Sinjai

para petani sudah menikmati kemudahan menggiling padi dengan RMU tersebut. "Ini adalah alat yang sangat dibutuhkan para petani di sini."

Ada sekitar 251 hektar lahan sawah di Mannanti. Para petani juga menyampaikan permintaan perbaikan infrastruktur pertanian di sekitar Mannanti, seperti perbaikan tanggul dan

Tidak saja bantuan RMU, mantan Kepala Dinas PU Sulsel ini juga membantu kelompok tani di Sinjai untuk mendapatkan bantuan subsidi pupuk, bibit, dan peralatan pertanian lainnya. Politisi dari dapil Sulsel II itu telah memperlihatkan kepeduliannya pada rakyat kecil yang diwakilinya.

Nasyit rajin membangun kedekatan dengan rakyat di dapilnya yang meliputi sembilan kabupaten, yaitu Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Wajo, Soppeng, Bone, dan Sinjai. Parlemenaria berkesempatan mengikuti perjalanan putra asli Sinjai itu, mengelilingi desa-desa di Kabupaten Sinjai.

Bertemu dan singgah di rumah penduduk setempat hampir menjadi rutinitasnya untuk mendengar aspirasi dan harapan masyarakat. Tak ada jarak antara dirinya dengan rakyat yang diwakilinya. ■

(Hus,mp) , Foto:Husen/hr



## Edhy Prabowo: Hentikan Proyek Reklamasi

Sejak setahun lalu Komisi IV DPR sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

"Saya tidak mengerti mengapa proyek ini terus berlanjut pembangunannya padahal banyak aturan yang dilanggar," kata Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, dalam akun media sosialnya, Jum'at (15/4).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan Teluk Jakarta adalah kawasan strategis, dan berdasarkan amanat Undang-undang, perubahan fungsi di kawasan strategis harus berdasarkan izin pemerintah pusat serta persetujuan DPR. Tidak bisa hanya berdasarkan Kepres terbitan lama karena kedudukan Kepres berada di bawah Undang-undang. Kalau mau negara ini baik, lakukanlah sesuatu berdasarkan Undang-undang.

Faktanya reklamasi telah melanggar

aturan, dan faktanya proyek ini hanya berpihak kepada pengusaha tapi tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya warga nelayan di pesisir Jakarta yang kediamannya diratakan secara represif dan tak manusiawi oleh pemerintah DKI Jakarta.

"Saya menuntut dan menantang kepada pemerintah, kalau pemerintah cinta Tanah Air dan tunduk kepada Undang-Undang, segera hentikanlah proyek reklamasi. Seandainya saya pemerintah, saya lebih memilih untuk menggusur para pengusaha nakal ketimbang menggusur rakyat sendiri. Sayang, fungsi DPR bukan mengeksekusi tapi hanya sebatas memberi rekomendasi," tegasnya.

Politisi Gerindra ini juga menanggapi salah satu media *online* ternama yang berkomentar agar DPR

jangan banyak bicara soal reklamasi bila nasibnya tak ingin seperti Sanusi (di-Sanusi-kan). "Saya tegaskan bahwa saya TIDAK TAKUT! Karena saya bekerja dan

menjaga Undang-undang. Salam Indonesia Raya...!", tandasnya. ■



Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo

(as), Foto : Naefuroji/hr

## Setjen dan BKD Sampaikan Hasil PMPRB

Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI menyampaikan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada MenPAN secara *online*, hal tersebut dilakukan oleh Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti Swasanani di damping seluruh pejabat Setjen dan BKD, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/4).

"Setiap tahun kita menyampaikan hasil progres perencanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen dan BKD kepada MenPAN. Penilaian yang dilakukan ini bukan maunya kita tetapi memang ada peraturan pemerintahnya, yang memberikan amanat untuk seluruh pegawai, jadi *moment* ini penting sekali karena hasil penilai tadi yang 85,47 itu adalah kontribusi dari seluruh unit kerja, dan Alhamdulillah dari seluruh kementerian, lembaga dan pemda kita

termasuk 5 besar yang telah menyelesaikan," ujar Winantuningtyastiti.

Lebih lanjut jelas Win begitu ia akrab disapa, seluruh pegawai melalui peraturan pemerintah diwajibkan menyusun SKP (Standar Kinerja Pegawai) yang di pantau langsung oleh atasannya, "Mengenai apa yang dikerjakan, hasil *output*nya apa, dan itu akan menjadi laporan. Ini tidak mudah karena butuh kerjasama seluruh ASN," tegasnya.

"Jadi kalau misalnya kita pegawai negerinya ada sekitar 1350 kemudian ada 50 saja yang tidak bergerak itu mengurangi nilai, dan akan mempengaruhi turunnya tunjangan dan lain-lain tentu



Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian Dewan DPR RI melaporkan hasil PMPRB kepada MenPAN secara *online*

kita tidak mau ini terjadi, makanya saya berterima kasih kepada semua yang telah berkontribusi" tambahnya.

Win pun berharap kedepan bisa dilakukan secara konsisten dan berkomitmen, "Ini bukan sesuatu yang mudah, kita punya tugas pokok dalam mendukung dewan, kita harus mengikuti irama kerja dewan termasuk juga mendukung terhadap kinerja dewan dalam menghasilkan target," jelasnya. ■

(rnm), Foto : Akta/hr



## Mohammad Syafii Pimpin Pansus RUU Pemberantasan Terorisme

Penyerahan palu sidang menjadi pertanda simbolis pemilihan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemberantasan Terorisme, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (18/4).

Fadli memberikan palu sidang kepada anggota Komisi III, Muhammad Syafii yang diamanatkan menjadi Ketua Pansus RUU Pemberantasan Terorisme.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menilai, susunan Pimpinan Pansus RUU Pemberantasan Terorisme yang baru saja ditetapkan sudah cukup harmonis.

"Komposisinya cocok, ada anggota Komisi I dan Komisi III. Jadi saya kira, kita bisa bekerja mulai dari sekarang," ujar Fadli Zon.

Selengkapnya susunan Pimpinan Pansus RUU Pemberantasan Terorisme.



Wakil Ketua DPR Fadli Zon melantik Pimpinan Pansus RUU tentang Pemberantasan Terorisme

Ketua Pansus, Muhammad Syafii dari Komisi III (F-Gerindra), Wakil Ketua, H.A. Hanafi Rais dari Komisi I (F-PAN), H.M Syaiful Bahri Ansori dari Komisi I (F-PKB), dan Supyadin Aries Saputra dari Komisi I (F-Nasdem).

Pimpinan DPR Koordinator Polkam ini menjelaskan, untuk target penyelesaian Revisi UU Terorisme ini diserahkan kepada Pansus. Namun dia berpesan agar dalam pembahasan RUU tersebut dapat dilakukan dengan cermat. "Hal ini yang paling utama. Cepat atau lambat menjadi nomor dua, yang pertama adalah cermat," tegasnya.

"Kita juga tidak mau tergesa-gesa menyangkut suatu kebijakan yang sangat sensitif, tapi juga tidak boleh lambat. Kirakira sesuai dengan kebutuhan saja. Tentu ada batas waktu sesuai undang-undang," pungkasnya dia. ■

(eko,mp). Foto: Iwan/hr

## Baleg Dorong UU Narkotika Masuk Prolegnas 2016

DPR bersama Pemerintah memiliki pandangan yang sama bahwa ada urgensinya untuk merevisi UU Narkotika. Untuk itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR akan mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dimasukkan ke dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.

"Baleg akan mengupayakan untuk memasukkan revisi UU ini ke dalam daftar prioritas Prolegnas 2016 ataupun 2017, itu komitmen kami di Baleg," demikian diungkapkan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/04).

Revisi ini dinilai penting karena harus menyesuaikan perkembangan peredaran narkotika yang semakin cepat dikalangan masyarakat. Diungkapkan Kepala BNN Komjen Budi Waseso, diperkirakan



Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas

sedikitnya 50 orang per hari meninggal dunia karena Narkoba. Belum lagi seluruh lapisan masyarakat telah terkontaminasi narkoba mulai dari TNI, POLRI, BNN, Kementerian/Lembaga sampai lapisan masyarakat bawah.

Menurutnya, revisi UU Narkotika sudah harus dilakukan karena sudah tidak relevan, mengingat banyak narkoba jenis baru yang belum dimasukkan dalam

lampiran peraturan pemerintah sehingga sulit untuk ditangani. BNN pun mengusulkan agar judul UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diubah menjadi tentang Narkotika dan Zat Psikoaktif Baru.

"Masalah ini sangat merusak generasi sehingga membutuhkan penanganan dan UU khusus yang spesifik dan memberikan efek jera kepada pengguna narkoba. Kalau kita tidak serius menangani ini maka negara ini akan terancam," ujarnya.

Sementara itu, Supratman Andi Agtas menambahkan, bila UU Narkotika sudah masuk daftar Prolegnas 2015-2019 maka revisi UU ini tergantung pada kesiapan pemerintah apakah sudah siap mengajukan draft revisi UU Narkotika untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas tambahan.

Selanjutnya, Baleg akan mengundang Menkumham Yasonna Laoly untuk pembahasan revisi UU Narkotika ini. "Sesuai penjelasan Pak Buwas, kondisi peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi, enggak bisa lagi kita tunda," tandas politisi Gerindra ini. ■

(ann,mp) Foto: Jayadi/hr



## BURT DPR Apresiasi Pelayanan RS Sari Mulia Banjarmasin



Tim Kunjungan Kerja BURT DPR mengunjungi RS Sari Mulia Banjarmasin

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Anton Sukartono Suratno mengapresiasi pelayanan yang diberikan kepada para peserta BPJS dan Jamkestama (jaminan kesehatan utama). Hal tersebut diungkapkannya usai meninjau RS Sari Mulia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kamis (14/4).

"Sebagai anggota BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR RI kami memiliki tugas untuk memastikan pelayanan dan fasilitas yang ada di rumah sakit-rumah sakit yang menangani pasien

seseorang," jelas Anton.

Ditambahkan politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, selain fasilitas atau peralatan yang memadai, hal yang juga patut diapresiasi dari RS Sari Mulia adalah selalu mengutamakan keselamatan pasien. Artinya ketika pasien UGD datang, pihak rumah sakit akan mendahulukan memberi penanganan medis, baru setelah itu proses penyelesaian administrasi.

"Misalnya ada anggota DPR sebagai pasien Jamkestama yang saat sedang melakukan kunjungan kerja tiba-tiba sakit

BPJS dan Jamkestama seperti kami (anggota DPR RI-red). Setelah kami lihat langsung, fasilitas dan peralatan yang disiapkan rumah sakit Sari Mulia, Banjarmasin ini cukup memadai, seperti adanya CT Scan, Elektrokardiogram (EKG) yang merupakan alat untuk mengetahui kondisi jantung

dan dibawa ke rumah sakit ini (RS Sari Mulia-red), pihak rumah sakit meyakini akan melakukan tindakan medis terlebih dahulu, baru kemudian proses administrasinya. Kami harus memastikan hal ini, Karena tidak semua pasien Jamkestama saat melakukan kunjungan kerja membawa kartu jamkestama. Dan hal ini pun harus juga diterapkan kepada pasien BPJS," ungkapnya.

Tidak hanya itu, pihak RS Sari Mulia juga meyakini Anton dan beberapa anggota BURT DPR RI yang ikut dalam kunjungan tersebut seperti Rendy Lamadjido, Ansory Siregar, Syaiful Bahri Anshori, Yastri S Mokoagow, Sri Melliyan dan Irma Suryani Chaniago, bahwa pihak RS Sari Mulia akan ikut melakukan pendampingan kepada pasien ketika kondisi pasien diharuskan untuk dirujuk ke rumah sakit lain yang lebih besar, seperti Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta untuk penderita jantung.

"Kami juga mengapresiasi pihak rumah sakit yang bersedia melakukan pendampingan ketika kondisi pasien mengharuskannya untuk dirujuk ke rumah sakit lain seperti di Jakarta. Kami berharap seluruh rumah sakit di Indonesia seperti ini. Selalu mengutamakan keselamatan pasien dan tidak melihat dari unsur manapun," pungkasnya. ■

(ayu) Foto: Ayu/hr

## Eka Sastra: Jangan Jadi Orang Biasa, Jadilah Orang Luar Biasa

Jangan menjadi orang biasa, tapi jadilah orang yang luar biasa, itulah pesan utama dari Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra, saat menerima puluhan mahasiswa FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, di Operation Room, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (18/4).

"Siapa pun yang berpikir positif dan itikad kuat, maka akan menjadi orang yang luar biasa," tegas Eka, yang didampingi Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Suratna, dan Kepala Bagian Humas DPR RI, Saeful.

Dalam paparannya, Eka

menceritakan perjalanan hidupnya yang bermula dari pengusaha, staf ahli di DPR, yang hingga akhirnya memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Jawa Barat III.

"Kami berusaha memberikan inspirasi kepada adik-adik kita, tentang beberapa hal yang tidak diajarkan di kelas, seperti profil dan fungsi DPR itu seperti apa. Sekaligus memberikan inspirasi, terkait kondisi politik yang terjadi di negeri kita," imbuh Eka.

Politisi F-PG itu berharap kepada generasi muda, untuk tidak bersikap anti



Suasana acara kunjungan puluhan mahasiswa FISIP UIN ke DPR

politik. Pasalnya, dari generasi muda itulah, akan muncul generasi penerus untuk semakin memperbaiki kondisi politik Tanah Air.

"Politik itu dinamika. Jika yang baik meninggalkan politik, maka politik akan dikuasai orang-orang yang kurang



## Komisi X Akan Terus Pantau Persiapan Asian Games XVIII

**K**etua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya memastikan, pihaknya melalui Panitia Kerja (Panja) Asian Games XVIII Tahun 2018, akan terus memantau persiapan acara yang akan digelar di Jakarta dan Palembang. Pasalnya, hal ini menyangkut harga diri bangsa sebagai tuan rumah AG XVIII.

Demikian ditekankan Riefky usai pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pengurus Komite Olimpiada Indonesia, PT. Pulomas Jaya, dan jajaran SKPD lain, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).

"Kami akan terus pantau persiapan AG 2018. Kami ingin persiapan AG ini benar-benar matang, bukan hanya persiapan atlet saja, tetapi juga persiapan keseluruhan dari Indonesia menjadi tuan rumah AG ini. Saya yakin seluruh pihak pasti ingin acara ini berjalan dengan sukses," kata Riefky.

Politisi F-PD itu juga memberikan apresiasi terhadap persiapan Pemprov DKI Jakarta, usai meninjau persiapan pembangunan *venue*, yakni Jakarta

International Equestrian Park di Pulomas yang akan dijadikan arena pacuan kuda, velodrome di Kawasari GOR Rawamangun, dan Wisma Atlet di Kemayoran.

"Kita mengapresiasi Pemprov DKI dalam persiapan AG ini. Kita akan lihat dan pantau persiapan *venue*, agar sesuai dengan standar internasional, dan cabang-cabang olahraga internasional," pasti Riefky.

Riefky menambahkan, *venue* yang dibangun ini, semata bukan hanya untuk gelaran AG 2018 saja, tetapi dapat digunakan di kemudian hari, untuk kepentingan olahraga Indonesia. Ia juga memastikan, fungsi pengawasan bukan berhenti di sini saja. Tetapi akan berlangsung selama persiapan AG.

"Selama persiapan AG ini, akan kami pantau terus, bagaimana perkembangannya. Kunjungan lapangan akan kami lakukan terus. Kita harapkan, event yang melibatkan 45 negara ini berjalan dengan sukses," harap politisi



Tim Panja Komisi X DPR memantau persiapan Asian Games XVIII di Pulomas

asal dahil Aceh itu.

Selain memantau persiapan venue di Jakarta, Riefky juga memastikan pihaknya akan memantau persiapan di Palembang, Sumatera Selatan.

Direktur Utama PT Pulomas Jaya, Landi Rizaldi, perusahaan BUMD di bawah Jakarta Propertindo yang bertugas menyiapkan arena pacuan kuda di Jakarta International Equestrian Park mengatakan, pihaknya akan segera menyelesaikan pembangunan paling lambat 6 bulan sebelum Asian Games, dimana penyelenggaraan pada Agustus 2018.

"Namun, penyediaan sarana dan prasarana harus lebih cepat, karena perlu mendapat pengakuan dari pihak berwenang, dan perlu menyelenggarakan kompetisi minimal 1 kali sebelum penyelenggaraan Asian Games," kata Landi.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Satgas Infrastruktur Gelora Bung Karno, mengatakan, pihaknya akan membantu percepatan pelaksanaan persiapan, dan memantau persiapan. Seluruh bangunan venue dan penataan kawasan dipastikan harus dapat memenuhi persyaratan dan standar internasional Asian Games.

Sementara untuk Wisma Atlet Kemayoran, akan dibangun 7 tower dengan lebih dari 5000 unit kamar, dan menampung lebih dari 16 ribu atlet.

Kunjungan lapangan ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah, Anggota Komisi X DPR, diantaranya Muslim, Esti Wijayati, Laila Istiana, Yayuk Sri Rahayuningsih, Bambang Sutrisno, Moreno Soeprapto, Sri Meliyana, dan Zainul Arifin Noor. ■

bertanggung jawab. Saya berharap mereka (mahasiswa, -red) belajar ilmu politik, dan kemudian masuk ke dalam hal-hal yang bersifat politik praktis," harap Eka.

Dalam kesempatan itu, politisi yang juga pengurus HIPMI itu mendorong generasi muda untuk terjun menjadi pengusaha-pengusaha muda.

Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Politik UIN Syarif Hidayatullah, Kholid Suryadi Ahmad mengatakan kunjungan studi ke DPR merupakan agenda tahunan yang sudah mulai dilakukan Himapol dari tahun lalu. Acara ini juga merupakan salah satu rangkaian program Ilmu Politik *Upgrading Skill* (Impus), untuk mewadahi mahasiswa yang ingin mengasah *soft skill*-nya.

"Kunjungan ini diprioritaskan untuk mahasiswa semester II dan IV, yang nantinya menjadi penerus kepemimpinan di republik ini untuk masa mendatang. Tujuannya yang paling penting adalah agar teman-teman memperdalam tentang DPR," beber Kholid.

Kholid menambahkan, dalam kunjungan ini, pihaknya fokus pada keterlibatan generasi muda untuk memperbaiki sistem perpolitikan Indonesia dari perspektif ekonomi.

"Karena menurut saya tidak akan ada kondisi politik yang stabil, jika kondisi ekonomi pun tak stabil," tutup Kholid.

Acara diselingi dengan tanya jawab antara mahasiswa dengan Anggota Dewan, dan diakhiri dengan pertukaran cenderamata. ■

(sf) Foto: Arief/hr

(sf) Foto: Azka/hr



## Irtama DPR Lakukan Penilaian Reformasi Birokrasi

Jajaran Inspektur Utama (Irtama) Sekretariat Jenderal DPR-RI, melakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara *online*. Penilaian mandiri dilakukan oleh assecor eselon I (Badan Keahlian Dewan, Deputi Administrasi, Deputi Persidangan dan Inspektorat Utama).

"Assecor ini dibentuk untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di unitnya masing-masing. Hasil penilaiannya akan dilaporkan kepada Setjen secara institusi untuk mendapatkan persetujuan atau masukan guna perbaikan," ujar Irtama DPR, Setyanta Nugraha, di ruang kerjanya Gedung Nusantara II baru-baru ini.

Setyanta yang akrab disapa Toto menjelaskan, agar nilai itu meningkat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya melalui delapan area perubahan. Pertama adalah manajemen perubahan dan sudah dibentuk agen perubahan diharapkan nanti akan membentuk atau mengubah *mindset* dan *cultureset* dalam melakukan layanan dan dukungan kepada dewan.

Yang kedua adalah area perubahan diperaturan perundang-undangan di

lingkup Setjen dan BKD. Kemudian yang ke tiga adalah area perubahan di organisasi dan sudah dilakukan restrukturisasi organisasi.

Selanjutnya, yang keempat area perubahan di tatalaksana, sudah banyak menghasilkan SOP tetapi juga masih akan membangun atau membuat peta masalah sehingga dapat menyambungkan SOP-SOP yang ada di unit-unit menjadi satu fokus.

Kemudian, area perubahan di bidang akuntabilitas terutama yang berkenaan dengan nilai, sudah ada upaya-upaya untuk meningkatkan bidang perencanaan, pelaksanaan, pembahasan dan pengawasan.

Dalam perubahan area pengawasan sudah dilakukan sosialisasi mengenai *wistle blowing system* dan benturan kepentingan, yang merupakan poin dalam perubahan area pengawasan yaitu peraturan setjen yang mengatur mengenai penanganan benturan kepentingan dan sistem pengaduan secara *online*.

"Jadi kita sudah punya aturan ketika pegawai atau *stakeholder*

ada yang ingin mengadakan suatu penyimpangan tetapi tidak memiliki keberanian secara langsung maka cukup melalui website dan tentu itu *unnoname*," kata Toto.

Terakhir lanjut dia, adalah pada pelayanan publik, yang nantinya diharapkan bisa menjadi pelayan yang murah, cepat, akurat dan akuntabel bagi anggota dewan dan masyarakat serta *stakeholder*. ■



Inspektur Utama Setyanta Nugraha

(rmm,mp), Foto: kresno/hr

## DPR Pertimbangkan Fasilitas Cuti Bagi Pejabat yang Maju Pilkada

Beberapa Fraksi di Komisi II DPR mengusulkan agar anggota DPR, DPD, DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, Polri TNI dan PNS serta pejabat BUMN yang akan maju pilkada cukup cuti dan tak perlu mengundurkan diri. Hal itu mencuat ketika Komisi II melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Komite I DPD RI di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat, (15/04).

Anggota DPR Fraksi Gerindra yang



Anggota Komisi II DPR Sareh Wiyono menyerahkan dokumen kepada Mendagri

diwakili oleh Sareh Wiyono mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap

*judicial review* terhadap UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU yang mewajibkan anggota DPR mundur justru mengabaikan fungsi partai.

"Keharusan mundur itu tidak memberikan rasa keadilan bagi partai. Jabatan kepala daerah adalah jabatan politik, bukan karier. Jadi cukup cuti," tegasnya.



Tak hanya itu, ia juga menilai bahwa putusan MK tersebut yang mengatur anggota, kepala daerah dan wakil kepala daerah, Polri, TNI dan PNS serta pejabat BUMN mundur juga tidak perlu. "Cukup cuti di luar tanggungan negara. Untuk menghindari diskriminasi calon petahana yang belum habis masa jabatan juga harus cuti," sambung Sareh.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa untuk mencalonkan diri maju pilkada, anggota DPR, DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, Polri, TNI dan PNS serta pejabat BUMN cukup mengajukan cuti untuk menghilangkan praktik tak terpuji.

"Untuk bisa mencalonkan diri, cukup cuti dan tidak harus mundur," ujar Hetifah.

Selain itu, Fraksi PDI-Perjuangan yang disampaikan oleh Arief Wibowo mengatakan terkait cuti atau mundur bagi

menjabat itu perlu dikaji secara mendalam.

Dirinya juga mengusulkan agar ketentuan tersebut nantinya juga diperluas bagi petahana. "Perlu tidaknya mengundurkan diri atau cuti perlu dikaji. Kami juga usul ketentuan itu nantinya diperluas pada petahana yang mencalonkan diri," ujar Arief.

Sebagaimana diketahui, draf revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dalam pasal 7 huruf p, q, s, t, u, tertuang aturan yang mengatakan keharusan anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Polri, TNI dan PNS serta pejabat BUMN yang akan maju pilkada wajib mengundurkan diri usai ditetapkan sebagai calon.

Selain itu, dalam Raker kali ini Komisi II juga telah membentuk Panitia Kerja (panja) Pilkada yang nantinya akan fokus untuk membahas hal teknis terkait proses

revisi tersebut. Nama-nama tersebut yakni Rambe Kamarul Zaman, Ahmad Riza Patria, Wahidin Halim, Lukman Edy, Al Muzammil Yusuf sebagai pimpinan Panja.

Sedangkan anggotanya yang terdiri dari perwakilan Fraksi DPR yakni Komarudin Watubun, Arif Wibowo, Sirmadji, Tagore Abu Bakar, Idham Samawi sebagai utusan Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi Golkar yang diwakili oleh Dadang S Muchtar, Hetifah, Agung Widyantoro. Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Endro Hermono, Azikin Solthan, Sareh Wiyono.

Fraksi Demokrat yang diwakili oleh Fandi Utomo dan Hari Kartana. Fraksi PAN yang diwakili oleh Yandri Susanto dan Sukiman. Fraksi PKB yang diwakili oleh Yanuar Prihatin dan Rohani Vanath. Fraksi PPP yang diwakili oleh Amirul Tamim, Fraksi Nasdem diwakili oleh Ali Umri serta Rufinus Hotmaulana Hutahuruk yang mewakili Fraksi Hanura. ■

(hs,mp)Foto: Rumi/hr

## Perancis Berusaha Hapus Pajak Progresif Minyak Sawit Indonesia

Pajak progresif yang diberlakukan Pemerintah Perancis terhadap impor minyak sawit atau CPO (crude palm oil) dari Indonesia akan diusahakan dihapus. Ini menjadi momentum yang baik untuk saling menguatkan hubungan kedua negara.

Para senator Perancis menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke DPR RI, Selasa (19/4). Delegasi senator Perancis tersebut diterima Anggota BKSAP DPR Effendi Simbolon dalam pertemuan di lantai 2 Nusantara II. Hadir mendampingi Effendi, Mindo Sianipar, Roem Kono, Ade Rezki Pratama, dan Rufinus Hotmaulana Hutauruk. Sementara delegasi senator Perancis dipimpin Jacques Gauter yang sekaligus menjadi Ketua Kelompok Persahabatan Indonesia-Perancis.

Dalam pertemuan tersebut, DPR menyoroti pajak progresif yang terlalu tinggi bagi produk CPO Indonesia yang masuk ke Perancis. Dengan komitmen para senator Perancis yang ingin menghapus pajak progresif itu, DPR tentu

mengapresiasi sikap parlemen Perancis. "Kami apresiasi sikap parlemen Perancis soal pajak progresif ini," ucap Effendi dalam pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Perancis memberlakukan pajak tinggi untuk produk CPO Indonesia, karena Indonesia dinilai tidak menjalankan program pembangunan berkelanjutan berupa pelestarian lingkungan hutan. Banyak pohon ditebang untuk industri sawit Indonesia. Pandangan ini coba diluruskan oleh Indonesia. Pajak super ini ditetapkan oleh parlemen Perancis pada 21 Januari 2016. Pajak CPO Indonesia semula € 300-900/ton. Kini, diusahakan turun hingga € 90/ton.

Dalam pertemuan itu, delegasi senator Perancis juga menyampaikan, akan bertolak ke Riau untuk melihat dari dekat perkebunan kelapa sawit. Tinjauan ini kelak akan menjadi bahan rekomendasi penting parlemen Perancis untuk



Sejumlah Anggota BKSAP berfoto bersama senator Perancis

menghapuskan pajak tinggi CPO Indonesia. Para senator ini ingin melihat bagaimana Indonesia membangun produksi CPO sesuai program pembangunan berkelanjutan. Hutan-hutan industri Indonesia untuk produk kertas juga akan ditinjau.

Di hadapan para Anggota BKSAP yang hadir, para senator Perancis itu akan meluruskan pemberitaan di media Perancis sekaligus meluruskan pula kritik dari LSM-LSM Perancis seputar produk CPO yang diduga merusak lingkungan. "Kami akan berusaha hapus pajak super itu dan kami ingin mempererat hubungan dengan Indonesia," ucap Jacques kepada pers usai pertemuan. ■

(mh), Foto: Rumi/hr



## DPR Kejar Pembahasan Revisi RUU Pilkada

**K**etua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman (F-Golkar) menargetkan pembahasan revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan selesai di pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015-2016 pada 29 April.

Sehingga, bisa digunakan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Dirinya mengakui bahwa DPR memiliki semangat untuk segera menyelesaikan revisi ini. "Semangat DPR untuk menyelesaikan RUU Pilkada ini sudah oke," ujar Rambe. Hal itu disampaikan di sela-sela Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Komite I DPD RI di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat, (15/04).

Dalam kesempatan ini, Menteri Dalam Negeri akan memaparkan draf revisi UU Pilkada yang diusulkan pemerintah untuk selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian pandangan mini sepuluh fraksi di DPR. "Kita ingin mendengar pemaparan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal pembahasan tahap II ini. Memang soal



Suasana raker Komisi II DPR dengan Mendagri

RUU Pilkada ini perlu dilakukan kajian mendalam," ujarnya.

Hal ini menurut Rambe sebagai upaya Komisi II untuk menciptakan regulasi yang mendukung proses demokrasi yang baik. "Kita inginkan dengan hadirnya revisi UU Pilkada ini bisa menciptakan regulasi dan demokrasi yang baik di Indonesia," sambungnya.

Anggota DPR Fraksi Golkar itu menyakini bahwa revisi UU Pilkada ini dalam pembahasannya bisa selesai dengan lancar karena poin-poin yang krusial sudah dibicarakan bersama. Beberapa poin krusialnya adalah keinginan untuk menyeimbangkan syarat bagi calon perseorangan dan calon yang diusung

partai politik.

Misalnya, dalam draf revisi UU Pilkada yang diusulkan pemerintah tertuang bahwa syarat pengusungan calon perseorangan atau pun parpol tidak berubah dari sebelumnya. Calon perseorangan harus mengumpulkan KTP 6,5-10 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pilkada sebelumnya. Sementara itu calon yang diusung parpol harus memperoleh 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pemilu DPRD.

Bagi Komisi II, hal itu sudah mengemuka rencana untuk menurunkan syarat bagi calon yang diusung parpol atau menaikkan syarat bagi calon perseorangan sehingga memenuhi azas keadilan. Terkait hal ini, Komisi II pun sudah berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis, (14/04). "Kita konsultasi ke MK, karena itu sifatnya *open legal policy* diberikan ke pembuat UU. Termasuk besaran syarat dukungan," pungkas Rambe.

Selain itu, terkait revisi UU Pilkada ini, Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa masih banyak yang perlu diatur seperti maraknya politik uang, adanya kepala daerah terpilih yang menjadi tersangka dan kasus Operasi Tangkap tangan (OTT) serta adanya yang meninggal ketika mencalonkan diri. ■

(hs.mpp). Foto: Rumi/hr

## BURT DPR Kunjungi RS. Harapan Keluarga di Mataram

**B**adan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengunjungi RS. Harapan Keluarga di Mataram, NTB, Rabu, (13/4) guna melihat fasilitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan bagi pasien Jamkestama.

"Jadi kunjungan kali ini tidak lain adalah untuk melihat kesiapan Rumah Sakit (RS) yang menangani pasien Jamkestama," kata Wakil Ketua BURT Achmad Dimiyati Natakusumah usai Tim Kunjungan BURT melakukan pertemuan dengan Direktur RS. Harapan Keluarga dr. IGK Lania beserta jajarannya.

Menurut Dimiyati, selain dalam penanganan pasien Jamkestama, kedatangan BURT juga sekaligus untuk melihat kesiapan peralatan yang dimiliki oleh RS tersebut, "Disini kita melihat fasilitas UGD nya, Radiologi, MRI, CT Scan dan lain sebagainya," jelas Dimiyati.

Selain peralatannya, tambah Dimiyati, BURT juga ingin mengetahui jumlah keberadaan dokter dan perawatnya, "Kita ingin tahu keberadaan dokter dan perawatnya, jangan sampai dokternya ada, perawatnya tidak ada, dan sekaligus ingin mengetahui perbandingannya, apakah satu

satu (satu perawat satu pasien-red), atau satu dua (satu perawat dua pasien-red)," terang politisi dari F-PPP ini.

Lebih lanjut, Dimiyati memaparkan, Tim juga melihat standar kamar untuk pasien, "Tinjauan ini diperlukan sehingga RS betul-betul siap dalam melayani pasien Jamkestama, khususnya anggota DPR beserta keluarganya," harapnya.

Untuk RS Harapan Keluarga ini, Dimiyati menilai cukup baik, peralatannya modern, dan standar kamar yang bagus.

"Pelayanan pasien Jamkestama untuk RS ini, saya lihat juga bagus, baik dalam



Tim Kunjungan Kerja BURT DPR mengunjungi RS. Harapan Keluarga di Mataram

penanganan rawat inap dan rawat jalannya dilayani secara maksimal dan tidak dipersulit, saya berharap RS Harapan Keluarga ini menjadi contoh bagi rumah sakit lainnya," harapnya.

Hal senada dikatakan oleh Anggota BURT Sukiman (F-PAN) yang ikut serta dalam rombongan, menilai RS. Harapan Keluarga di Mataram cukup bagus, baik sarana dan prasarana, tenaga medis, dokter spesialis, keramahmataman, juga kebersihannya.

"Mudah-mudahan ini bisa memberikan

pelayanan yang prima bagi masyarakat terutama pelayanan bagi VVIP khususnya bagi anggota DPR dan keluarga serta yang tidak kalah penting masyarakat yang ada di daerah Mataram dan sekitarnya," harap Sukiman.

Sementara itu dalam pertemuan, Direktur RS Harapan Keluarga dr. IGG Lania menjelaskan bahwa pihak RS. Harapan Keluarga pada prinsipnya akan berusaha sebaik mungkin dalam melayani pasien Jamkestama, seperti untuk anggota DPR dan keluarga.

"Kami berterima kasih atas *supportnya* untuk bisa melayani Bapak dan Ibu beserta keluarganya disini, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani," terang Lania.

Lebih lanjut, Lania menerangkan, bahwa RS. Harapan Keluarga belum termasuk RS Internasional, rumah sakit ini memiliki 250 orang karyawan, 50 orang dokter spesialis disegala bidang keilmuan,

dan 10 orang dokter umum, dan sekitar 70 orang perawat, dengan jumlah tempat tidur sekitar 109.

Fasilitas yang ada di RS. Harapan Keluarga sudah cukup lengkap, salah satunya sudah tersedianya ICU, NICU/PICU, peralatan MRI, CT Scan, C-ARM, Fluoroskopi, Kolposkopi, Echocardiography, Dental X-Ray, Mobile X-Ray

"Untuk ruangan rawat inap kami mempunyai empat ruangan super VIP, VIP B, Superior, standar A atau biasanya disebut kelas 1 terdiri dari dua tempat tidur, standar B empat tempat tidur, dan kelas C nya enam tempat tidur," terang Lania.

Salah satu kendala yang ada di RS. Harapan Keluarga, jelas Lania, adalah belum tersedianya landasan helikopter, "Kami belum ada helikopter pad, berlandasnya helikopter, sementara ini jika ada pasien yang dibawa helikopter disarankan di lapangan terbuka dekat dengan RS lalu kami jemput," kata Lania.

Turut hadir dalam rombongan, anggota BURT dari Fraksi PKS Refrizal, Yulian Gunhar dan Indah Kurnia dari F-PDIP, Andi Fauziah Pujiwati Hatta dari F-PG. ■

(nt) Foto: Nita/hr

## Pansus RUU Paten Terima Masukan US Chamber of Commerce

Panitia Khusus (Pansus) RUU Paten DPR-RI menerima kunjungan US Chamber of Commerce atau Kamar Dagang Amerika Serikat pada Selasa, (19/04) di Ruang Tamu Pimpinan Pansus B, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan balasan dari kunjungan Pansus RUU Paten yang beberapa bulan lalu ke Amerika Serikat.

Ketua Pansus RUU Paten John Kennedy Azis mengatakan dalam kunjungan ini, US Chamber of Commerce memberikan masukan terkait pembahasan RUU Paten yang saat ini sedang dalam proses pembahasan di DPR. "Ini merupakan kunjungan balasan, karena dulu kita juga pernah berkunjung kesana ketika Pansus RUU Paten melakukan kunjungan kerja ke Washington DC. Nah dalam konteks pembahasan RUU, mereka telah memberikan masukan kepada kita terkait paten," ujarnya.



Ketua Pansus RUU Paten John Kennedy Azis

Sebagaimana diketahui, pembahasan RUU Paten memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). John Kennedy menuturkan selama masukan yang diterima itu tidak menguntungkan bagi Indonesia bukan tidak mungkin untuk menolaknya.

"Sejauh masukan itu memang menguntungkan untuk Indonesia, ya usulan mereka boleh saja untuk dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut. Karena bagaimanapun RUU Paten ini adalah untuk perbaikan kita semua. Agar terkait penelitian menjadi lancar serta invensi yang berkembang," jelasnya. Tetapi jika masukannya itu merugikan Indonesia, John menegaskan tidak akan menerimanya.

Kepada tamu yang hadir, politisi Partai Golkar ini menuturkan bahwa pembahasan RUU Paten ini adalah pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR. Sehingga dalam prosesnya diputuskan melalui forum bersama. "RUU Paten sebagaimana dibahas dalam panja akan dibahas bersama dan diputuskan bersama berdasarkan forum yang ada," papar John. ■

(hs,mp), Foto: Arief/hr



## Komisi III Kunjungi BPK Terkait Audit Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yakin hasil audit transaksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan RS Sumber Waras benar adanya karena lembaga yang mempunyai otoritas untuk menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK. Dikemukakannya juga, BPK menemukan beberapa kejanggalan dalam proses audit investigasi pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Setelah dilakukan audit oleh BPK, ditemukan beberapa masalah, dan yang mencengangkan Komisi III adalah hasil audit kerugian negara ternyata Rp 173 miliar," ungkap Benny saat melakukan Konferensi Pers Rapat di Gedung BPK Jakarta, Selasa (19/4) sore.

Sebagaimana diketahui, temuan



Konferensi Pers Komisi III DPR usai menemui BPK terkait RS Sumber Waras

semula BPK mengindikasikan adanya kerugian negara mencapai 193 miliar. Namun setelah audit investigasi dilakukan nilainya menjadi Rp 173 miliar.

Benny (F-Demokrat) juga mengatakan terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan Pemprov DKI dalam proses penjualan tanah RS Sumber Waras, baik yang bersifat administratif maupun hukum.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi III

lainnya, Desmond J Mahesa (F-Gerindra), menambahkan DPR masih akan memperdalam hasil audit BPK dengan memanggil mantan Pimpinan KPK lalu. "Kita akan memanggil mantan pimpinan KPK yang lalu karena BPK menyerahkan hasil audit yang diterima pimpinan sebelumnya," katanya.

Sementara itu, saat ditanyai mengenai tindak lanjut dari Komisi III apakah akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, Benny menyatakan, sampai pada saat ini DPR belum memandang penting untuk memanggil Ahok demi meminta keterangan.

Masih dijelaskan Benny, kunjungan Komisi III ke BPK atas dasar laporan sekelompok masyarakat yang mendatangi Komisi III dengan pengaduan kasus Sumber Waras sehingga untuk menindaklanjuti laporan itu, Komisi III wajib mengadakan rapat konsultasi dengan BPK.

"Selanjutnya Komisi III akan memantau dan mengawal sejauh mana proses hukum yang dilakukan oleh BPK," imbuhnya. ■

(ann/mp) Foto: Andri/hr

## Komisi VI Bahas Realisasi Anggaran dan Kendala Kementerian Perindustrian

Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan jajaran Kementerian Perindustrian, di ruang Sidang Komisi VI membahas realisasi anggaran tahun 2016 pada triwulan I. Selain itu juga forum mendiskusikan progres pelaksanaan anggaran tahun 2016.

Raker dipimpin Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir, didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VI Farid Al Fauzi (F-Hanura). "Mohon dijelaskan realisasi anggaran Kementerian Perindustrian pada triwulan I tahun anggaran 2016," ungkap Pimpinan Sidang, Selasa (19/4).

Menteri Perindustrian Saleh Husin memaparkan, realisasi anggaran di kementerian yang dia pimpin sampai dengan 31 Maret 2016 sebesar Rp.

258,046 miliar atau 7,89 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 3,271 triliun.

Selain itu, Komisi VI juga mempertanyakan hambatan yang dihadapi oleh lembaga yang dipimpin oleh Saleh Husin ini. "Kendala apa saja yang dihadapi Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan anggaran tersebut dan bagaimana solusi mengatasi hal tersebut," ujar Hafisz, Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

"Adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Perindustrian yang diikuti dengan perubahan nomenklatur dan pejabat yang bertanggung jawab, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap revisi nomenklatur di berbagai unit eselon I," jawab Saleh



Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir

memberi penjelasan.

Selain itu, Saleh mengungkapkan, ada beberapa kegiatan yang masih menunggu nota kesepahaman perjanjian kerja sama antara Kementerian Perindustrian dengan pihak terkait. "Masih terdapat beberapa kegiatan yang diblokir," ungkapnya. ■

(eko/mp) Foto: Jakarta

# Komisi IV Berjuang Bebaskan 13 Nelayan Brebes yang Ditangkap Aparat Hukum



Komisi IV DPR mendengar aspirasi keluarga nelayan Brebes yang di tangkap Ditpolair Polda Sumsel

**K**etua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo memastikan pihaknya akan berjuang membebaskan 13 nelayan asal Brebes, Jawa Tengah, yang ditangkap Ditpolair Polda Sumatera Selatan, saat berada di perairan Tanjung Menjangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel, beberapa waktu yang lalu.

Demikian dikatakannya usai melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Brebes dan masyarakat nelayan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Kluwut, Brebes, Jawa Tengah, Kamis (21/4). Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Brebes, Nardjo.

"Semangat dari Komisi IV DPR adalah mengupayakan pembebasan ke 13 nelayan ini, tanpa melanggar aturan dan hukum yang sudah berjalan. Proses hukum tidak boleh kita sembarangan merubahnya," tegas Edhy.

Oleh karena itu, masih kata Edhy, pihaknya akan meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pendekatan sesuai dengan hukum yang sudah diputuskan itu, dan mengupayakan agar ke 13 nelayan itu bisa segera pulang ke kampung halamannya.

"Pendekatan itu pertama pendekatan

ke eksekutif dulu, sehingga secara politik kita bisa membebaskan. Kami minta Menteri KKP untuk berkoordinasi dengan penegak hukum, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimanapun itu, mereka adalah masyarakat nelayan kita, sehingga kalau memang mau dihukum, tentu ada caranya," kata Edhy.

Padahal, kata politisi F-Gerindra itu, apa yang dilakukan oleh 13 nelayan itu merupakan pelanggaran Peraturan Menteri yang diminta Komisi IV DPR untuk tidak diterapkan, yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015. Ketika Permen ini mulai diterapkan pun, Menteri KP juga berjanji tidak akan ada penindakan hukum jika ada nelayan yang melanggarnya.

"DPR belum setuju Permen ini, Menteri belum mau mencabut, dan berjanji tidak akan melakukan penegakan hukum, tapi nyatanya ada. Ini baru satu kasus di Brebes, dan di daerah lain juga ada. Kita harapkan masalah ini cepat selesai," harap Edhy.

Ironisnya, lanjut politisi asal dapil Sumatera Selatan itu, nelayan yang ditangkap ini merupakan nelayan yang sulit mendapatkan ikan di wilayahnya, sehingga

mencari ikan ke wilayah lain yang memiliki potensi ikan.

"Kami berharap, masyarakat Brebes, yang ditimpa musibah ini, bisa sabar menghadapinya, tidak terprovokasi, dan dapat tenang menghadapinya. Saya sedih juga melihatnya. Ini yang harus kita selesaikan bersama," yakin Edhy.

Dalam kesempatan ini, Tim Komisi IV DPR juga memberikan bantuan finansial kepada keluarga nelayan yang ditangkap.

Sebagai gambaran di lokasi TPI Krukut, sesaat setelah Tim Kunjungan Komisi IV DPR tiba, para warga sudah mengibarkan spanduk bertuliskan "Tolong!!! Bebaskan Bapak Kami". Bahkan beberapa ibu-ibu berhamburan mendekati Anggota Komisi IV DPR untuk menyerukan permintaannya. Jeritan dan tangisan pun tak terelakkan.

Mengutip dari sebuah media *online*, 13 nelayan itu diamankan dengan barang bukti berupa tangkapan ikan, alat penangkap ikan jenis cantrang modifikasi dan pukat harimau, yang penggunaannya dilarang karena dapat merusak terumbu karang dan membunuh ikan kecil. Selain itu, mereka diamankan karena telah melanggar izin wilayah penangkapan.

Para nelayan tradisional yang ditangkap ini diduga juga melewati batas wilayah. Jika terbukti menyalahi aturan, para nahkoda kapal ini akan dikenakan Pasal 85 Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, dengan hukuman 5 tahun penjara.

Kunjungan ini juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron (F-PD), dan Anggota Komisi IV DPR I Made Urip (F-PDI Perjuangan), Ono Surono (F-PDI Perjuangan), Yadi Srimulyadi (F-PDI Perjuangan), Agustina Wilujeng Pramestuti (F-PDI Perjuangan), Ichsan Firdaus (F-PG).

Kemudian, OO. Sutisna (F-Gerindra), Andi Nawir (F-Gerindra), Sjahrani Mataja (F-Gerindra), Haeruddin (F-PAN), Taufiq R. Abdullah (F-PKB), Sa'duddin (F-PS), Zainut Tauhid Saadi (F-PPP), Fadholi (F-Nasdem). ■

(sf), foto: Sofyan/hr.



# BERITA BERGAMBAR



Tim Panja Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018 Komisi X DPR meninjau sarana dan prasarana kesiapan Asian Games di Pulomas dan Kemayoran, Selasa (19/4). Foto: Azka/hr



Panitia Khusus RUU Paten DPR menerima kunjungan Kamar Dagang Amerika Serikat sekaligus menerima masukan pembahasan RUU Paten di Ruang Pansus B DPR Selasa, (19/4), Foto : Arief/ hr



Panitia Kerja Nelayan dan Pencemaran Laut Komisi IV DPR meninjau lokasi penambangan pasir laut yang digunakan untuk material reklamasi Teluk Jakarta di Desa Lontar, Banten, Rabu (20/4). Foto: Jayadi/hr

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344

Layanan Informasi Publik di [www.ppid.dpr.go.id](http://www.ppid.dpr.go.id)

@dpr\_ri DPR RI @DPR\_RI DPR RI

Jangan Lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

